ISSN : 1412 – 0216

JURNAL

EKOMA

Volume 6, Nomor 2, Oktober 2008



STIE WIDYA DHARMA
SURABAYA

Ekoma	Volume 6	Nomor 2	Hal. 81-160	Surabaya Oktober 2008	ISSN 1412-0216

EKOMA

Volume 6, Nomor 2, Oktober 2008

Jurnal EKOMA (Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi), merupakan wadah informasi berupa hasil penelitian, laporan kasus dan tinjauan pustaka yang merupakan konsep-konsep pemikiran inovatif hasil telaah pustaka yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu pengetahuan. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan gaya bahasa efektif dan akademis. Terbit pertama kali tahun 2001 dengan frekuensi terbit dua kali setahun pada bulan Oktober dan April.

Pelindung:
Ketua STIE Widya Dharma

Penasehat:
Pembantu Ketua I
Pembantu Ketua II
Pembantu Ketua III

Ketua Penyunting:
H.Mohammad Usman,Drs.,SE.,MM.

Wakil Ketua Penyunting :
Hj.Endang Tjiptaning Rum,Dra.

Penyunting Ahli :
Dr.H.Farhan Ghozali,Drs.,SH.,MM.
Dr.H.Miskan,SH.,MH.
Dr.H.Hidayat,MM
Dr.Hj.Woro Utari,MM
Hari Purwanto,Drs.,SE.,MM.
Hartoyo,Drs Ec.,MM.
Achmad Maqsudi,Drs.,Msi.,Ak.
H.Kusnan,Drs.,Ir.,SE.,MT
Soedarso,S.Sos.,M.Hum.

Tata Usaha:
Elis Mulyani,SE
Evan

Alamat Redaksi/Penerbit:
STIE Widya Dharma Surabaya
Jl.Ketintang 147 Telp. (031) 8284304 Surabaya.

Pengantar Redaksi

Dengan memuji syukur kehadirat Allah S.W.T., bahwa atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, maka Jurnal EKOMA Volume 6 nomor 2, Oktober 2008 dapat diterbitkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada penyumbang artikel, baik artikel hasil penelitian, laporan kasus dan tinjauan pustaka. Tidak lupa kami mohon maaf karena tidak semua artikel dapat dimuat di nomor ini, dan mudah-mudahan bisa dipertimbangkan untuk dapat dimuat di nomor penerbitan berikutnya. Redaksi menyadari bahwa pada penerbitan ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan.

Selanjutnya redaksi memberi kesempatan kepada semua kalangan yang berminat untuk menyumbangkan artikelnya agar bisa diterbitkan pada nomor penerbitan berikutnya.

Redaksi

ISSN 1412 – 0216

EKOMA

Volume 6, Nomor 2, Oktober 2008

Daftar Isi

Penerarapan Strategi Pelayanan Ekspedisi Muatan Kapal Laut Berdasarkan Analisis SWOT Pada PT.Samasagung Tunggal Perkasa Surabaya 81-88
Sjamswana Juwana

Peranan Koperasi Dalam Mengembangkan Kegiatan Ekonomis Para Anggotanya 89-102
Sutatmi

Sikap Konstruktif Terhadap Perubahan 103-110
Sjamswana Juwana

Kebijakan Privatisasi BMUN Dan Pengaruhnya Bagi Perekonomian Nasional 111-120
Endang Sri Andayani

Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional Dalam Meningkatkan Sumberdaya Manusia 121-132
Mohammad Usman

Sistim Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Strategi Balanced Scorecard 133-148
Nur Hidayati Murtiningrum

Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap return Saham (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta) 149-160
Abdul Somad

KEBIJAKAN *PRIVATISASI* BUMN DAN PENGARUHNYA BAGI PEREKONOMIAN NASIONAL

Sri Andayani
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang

ABSTRAK

Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 2, BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi ikut memainkan peran penting bagi keberhasilan perekonomian nasional guna mendukung keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun krisis ekonomi tahun 1997 telah memporakporandakan perekonomian nasional termasuk juga BUMN kita. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya adalah dengan melakukan privatisasi. Dari sisi makro ekonomi, keberhasilan privatisasi dapat dilihat dari sumbangannya terhadap keuangan negara dan perbaikan iklim investasi, dan pengembangan pasar modal. Walaupun kebijakan privatisasi BUMN salah satunya untuk menutup defisit anggaran, namun nampaknya tujuan kebijakan ini adalah konsep jangka pendek, dan menyesatkan jika dipaksakan untuk dijual murah di saat krisis. Sedangkan perannya terhadap perkembangan investasi dan perkembangan pasar modal ditunjukkan oleh semakin membaiknya IHSG dan tingkat kapitalisasi pasar BUMN terhadap kapitalisasi BEI, dimana BUMN menyumbang sebesar 35%. Selaku pemegang saham, pemerintah mestinya berkepentingan mendorong pengembangan usaha BUMN agar bisa memperoleh laba yang cukup besar serta kontribusi pajak untuk mengurangi defisit anggaran.

Kata kunci: privatisasi BUMN, perekonomian nasional

PENDAHULUAN

Undang-Undand Dasar (UUD) 1945 pasal 33 mengamanatkan bahwa pelaku utama sistim perekonomian Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi

BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi ikut memainkan peran penting bagi keberhasilan perekonomian nasional guna mendukung keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan BUMN diatur dalam Undang-Undang (UU) no. 19 Tahun 2003. Pada pasal 2, disebutkan maksud dan tujuan pendirian BUMN, yaitu (1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (2) mengejar keuntungan; (3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan (5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat

Sejak pemerintahan Orde lama sampai dengan sekarang, perkembangan BUMN mengalami pasang dan lebih banyak surutnya. Namun surutnya kinerja BUMN mulai disadari dan dicermati secara

serius sejak terjadinya krisis moneter di Indonesia tahun 1997. Krisis tersebut telah memporakporandakan perekonomian nasional termasuk juga BUMN kita. Hal ini bisa dilihat dari data kesehatan BUMN sejak krisis tersebut. Jumlah BUMN dibawah pembinaan Menteri Keuangan pada tahun 1998 sebanyak 128 perusahaan. Total asset yang dikelola BUMN sekitar Rp 500 triliun (akhir tahun 1999) dan bergerak hampir di seluruh bidang aktivitas ekonomi. Dilihat dari tingkat kesehatannya pada tahun 1998, dari 128 perusahaan tidak ada (0%) yang kondisinya sehat sekali, hanya 69,5% yang dinyatakan sehat dan sisanya (30,5%) kondisinya kurang dan tidak sehat.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia bahwa salah satu penyebab krisis yang melanda Asia (termasuk Indonesia) adalah lemahnya implementasi *good corporate governance* (Ruru, 2002). Lemahnya implementasi *good corporate governance* menyebabkan perusahaan berkinerja buruk, serta tidak mampu bersaing dengan *competitor* dalam maupun luar negeri. Bahkan hasil banyak kajian menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang terburuk dalam penerapan *good corporate governance* di Asia (McKinsey Investor Opinion Survey,1999-2000, dalam Ruru. 2002). Indonesia merupakan negara yang paling tinggi tingkat KKN-nya di Asia, dan menduduki peringkat 88 *Corruption Persception Index* (CPI) 2001 dari 99 negara yang disurvey (urutan ke empat terendah, diatas Bangladesh, Nigeria, dan Uganda).

Begitu pentingnya *Good Corporate Governance* tersebut, maka kementerian negara BUMN menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 yakni tentang Penerapan Praktek *good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam Surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa *Corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Secara umum prinsip dasar *good corporate governance* adalah transparansi, kemandirian dan akuntabilitas

Mengingat banyak BUMN yang kinerjanya kurang baik, maka BUMN perlu diberdayakan secara optimal. Untuk itu pemerintah melaksanakan kebijakan retrukturisasi, salah satunya dengan melakukan privatisasi. Privatisasi yang istilah lainnya adalah denasionalisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Dengan demikian lawan dari privatisasi adalah nasionalisasi. (http://id.wikipedia.org/). Secara teori, privatisasi membantu terbentuknya pasar bebas, mengembangnya kompetisi kapitalis dan menutup peluang monopoli, yang oleh para pendukung faham kapitalis dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Sebaliknya, para sosialis menganggap privatisasi sebagai hal yang negatif, karena memberikan layanan penting untuk publik kepada sektor privat akan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang buruk, akibat penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan profit.

Tujuan privatisasi dapat dilihat dari sisi Kementerian Negara BUMN yang mempunyai pandangan dari sisi ekonomi mikro, Departemen Keuangan yang lebih memandangnya dari sisi ekonomi makro, dan lembaga legislatif yang menggunakan pandangan ekonomi politik. Secara ekonomi mikro, privatisasi bertujuan meningkatkan produktivitas, profitabilitas, efisiensi, dan pengurangan utang perusahaan BUMN. Privatisasi juga diharapkan dapat meningkatkan *good corporate governance* (GCG), masuknya sumber keuangan baru ke perusahaan, dan pengembangan pasar. Manfaat alih teknologi dan peningkatan jaringan juga diharapkan dalam privatisasi BUMN yang melalui proses *strategic sale*. Dari sisi ekonomi makro, tujuan privatisasi berorientasi pada kepentingan fiskal, yaitu untuk menambah sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah, perbaikan iklim investasi, dan pengembangan pasar modal. Sedangkan dari pandangan ekonomi politik privatisasi bertujuan melindungi aset nasional dengan pertimbangan melindungi bidang usaha yang berkaitan dengan nasionalisme, keamanan negara, dan usaha sumber daya alam.

Dalam kajian ini akan dibahas pengaruh privatisasi terhadap APBN, iklim investasi dan pengembangan pasar modal, dan kesejahteraan masyarakat,.

PEMBAHASAN

1. Privatisasi dan Kontribusinya terhadap APBN

Jumlah BUMN besar yang jumlahnya mencapai 140 an memerlukan dana yang tidak sedikit untuk kegiatan investasi dan operasionalnya. Jika dibandingkan dengan kebutuhan belanja negara, kebutuhan belanja BUMN jauh lebih besar dibanding kebutuhan anggaran negara. Sebagai contoh, pada tahun 2006 dan 2007 jumlah *belanja modal* negara sebanyak 69,8 triliun dan 73,1 triliun sementara belanja modal BUMN 70,1 triliun dan 114,1 triliun. Pada tahun 2006 dan 2007 jumlah *belanja operasional* negara sebanyak 135,1 triliun dan 173,4 triliun sementara *belanja operasional* BUMN 605,5 triliun dan 601,3 triliun (Kementrian Negara BUMN, 2007). Dengan demikian kebutuhan dana investasi dan operasional BUMN selama tahun 2006 dan 2007 berturut-turut adalah 100,43%; 156,09%; 448,19% ; 346,77% dari kebutuhan belanja negara.

Dengan kebutuhan belanja modal dan operasional yang begitu besar, jika BUMN dikelola dengan manajemen corporat yang efektif dan efisien akan menghasilkan kenaikan kinerja BUMN. Sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian BUMN diantaranya memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, maka seberapa besar sumbangan tersebut dapat kita lihat dari besarnya dana yang masuk sebagai sumber penerimaan negara, khususnya yang berasal dari hasil privatisasi dan deviden BUMN.

Selama masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menganut sistem berimbang (*balanced budget*), dan sejak tahun anggaran 2000, kebijakan APBN menganut sistem defisit (*deficit budget*). Kebijakan ini ditempuh dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Untuk menutup defisit

anggaran tersebut pemerintah meng-upayakan program financing melalui pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri bersumber dari program privatisasi BUMN dan penjualan aset program retsrukturisasi perbankan, yang dalam tahun anggaran 2000 masing-masing ditargetkan sebesar Rp 6,5 trilyun dan Rp18,9 trilyun. Namun, realisasi kedua sumber financing dalam negeri ini (1 April s/d 31 Desember) hanya mencapai Rp18,9 trilyun, yang kesemuanya bersumber dari penjualan aset program restrukturisasi perbankan, sementara dari sumber privatisasi nihil. Dengan demikian, pada tahun anggaran 2000, pembiayaan defisit APBN yang bersumber dari privatisasi BUMN tidak mencapai target (data di Lampiran)

Selama tahun 2001 sampai 2004 besarnya realisasi hasil privatisasi adalah 3,465 milyar, 7,952 milyar, 7,301 milyar, dan 6,440 milyar. Jika dibandingkan dengan pembiayaan bersih APBN realisasi, maka rata-rata sumbangan hasil privatisasi terhadap total pembiayaan pemerintah adalah 19,2%. Jumlah ini tidak merata setiap tahun (karena tahun 2001 misalnya sumbangan privatisasi terhadap pembiayaan bersih hanya 8,2%) dan jika dibandingkan dengan defisit anggaran tiap tahun, jumlah ini sangat kecil dan karenanya sangat kecil perannya dalam upaya meningkatkan perekonomian negara. Selain itu target privatisasi nampaknya sering tidak dapat tercapai, misalnya pada 2007, pemerintah menargetkan setoran privatisasi (*netto*) sebesar Rp 3,3 triliun, namun hingga akhir tahun setoran privatisasi hanya tercapai Rp 3,09 triliun. Tahun 2008 setoran privatisasi ditargetkan sebesar Rp 1,5 triliun. tapi beberapa waktu kemudian direvisi target itu menjadi hanya Rp500 miliar.

Walaupun kebijakan privatisasi BUMN dilakukan salah satunya untuk menutup defisit anggaran, namun nampaknya tujuan kebijakan ini adalah konsep jangka pendek, dan misleading apabila dipaksakan untuk dijual murah di saat krisis. Selaku pemegang saham, pemerintah mestinya berkepentingan mendorong pengembangan usaha BUMN agar bisa memperoleh laba BUMN yang cukup besar serta kontribusi pajak yang dihasilkan. Kedua sumber pendapatan inilah yang masuk dari pintu penerimaan dalam menghitung penerimaan perpajakan dalam APBN. Secara prinsip manajemen, kebijakan privatisasi BUMN perlu dilakukan dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kompetitif.

Kontribusi BUMN terhadap APBN dilihat dari setoran bagian laba BUMN dapat dilihat misalnya pada tahun 2008 penerimaan negara yang bersumber dari bagian laba BUMN sebesar 31.244,3 milyar atau 0,7% dari PDB dan pada tahun 2009 direncanakan sebesar 30.794 milyar atau 0 ,6% dari PDB. Namun demikian dari jumlah tersebut lebih dari 50% berasal dari laba BUMN Pertamina dan sisanya dari BUMN bukan Pertamina. Jika dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan BUMN yang rata-rata 2 sampai 4 kali lipat di atas pembiayaan pemerintah, hal ini juga menunjukkan kecilnya peran BUMN dalam meningkatkan perekonomian negara.

2. Privatisasi dan Pengaruhnya Terhadap Iklim Investasi dan Pengembangan Pasar Modal

Jika dilihat dari perkembangan kekayaan BUMN selama periode 2000—2006 telah mengalami

peningkatan dari 137.980.172.400 menjadi 384.917.275.600 (meningkat 179%). Namun peningkatan tersebut dimbangi dengan hutang yang sangat tinggi yakni dari 581.902.800.300 menjadi 961.517.514.000 (meningkat 65%). Sedangkan jika dilihat dari perkembangan keuntungan BUMN selama periode tersebut mengalami peningkatan yang berarti. Dari 14 (empat belas) BUMN, 4 (empat) diantaranya termasuk ke dalam kelompok 20 perusahaan pemeroleh gain tertinggi di pasar modal (yakni, PTBA, BBRI, TELKOM, BMRI) dan tidak ada BUMN yang masuk kedalam 20 perusahaan go public pemeroleh rugi terbesar. Data secara lebih lengkap disajikan pada Lampiran 2. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata besarnya laba setelah pajak telah mengalami kenaikan yang signifikan. Besarnya tingkat ROE sejak tahun 2004 mengalami peningkatan, yakni rata-rata 10% (Lampiran Tabel 3). Pertanyaan besarnya adalah apakah kenaikan kinerja keuangan tersebut juga akan mempengaruhi perekonomian nasional?

Salah satu instrumen perekonomian termudah yang dapat dijadikan sebagai indikator perekonomian negara adalah pasar modal, sebab pasar modal adalah sistem yang terorganisasi yang di dalamnya terdapat kegiatan yang berkaitan dengan penawaran dan permintaan efek, Perusahaan Go Public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berkaitan dengan efek. Untuk dapat mengetahui kondisi pasar modal, kita dapat mengikuti perkembangan Indek Harga Saham seperti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Indeks sektoral, LQ-45, Indeks Kompas 100, dan JII (Jakarta Islamic Index). IHSG misalnya, merupakan total perhitungan rata-rata dari seluruh transaksi perdagangan efek yang terjadi di bursa efek pada suatu hari tertentu. Selain itu aktif tidaknya pasar modal juga dapat dilihat dari tingkat kapitalisasi pasar.

Peningkatkan kinerja perusahaan akan mempengaruhi keputusan investasi para investor di pasar modal. Semakin baik kinerja perusahaan maka akan semakin banyak investor yang ingin memiliki saham perusahaan tersebut, sehingga harga saham perusahaan yang dimaksud akan mengalami kenaikan. Sementara kenaikan harga saham akan menyumbang kenaikan Indeks Harga Saham. Indeks Harga Saham mengindikasikan baik atau tidaknya kinerja perusahaan yang *go public*. Sementara, membaiknya kinerja perusahaan, mempunyai dampak pada menurunnya jumlah pengangguran, meningkatkan PDB, dan akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan.

Dilihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), selama periode 1994 sampai akhir tahun 2008 terus mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 1994, IHSG masih berada pada level 469,640. Meskipun sempat mengalami penurunan pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1997, akan tetapi pada era tahun 2000-an IHSG mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Pada tanggal 9 Januari 2008, IHSG mencapai level tertinggi sepanjang sejarah Pasar Modal Indonesia yaitu ditutup pada level 2.830,263 atau meningkat sebesar 502,65% dibandingkan penutupan tahun 1994. Selain aktivitas transaksi yang meningkat, dalam kurun yang sama, Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) juga menunjukkan kenaikan yang luar biasa. Peningkatan IHSG

menunjukkan kinerja perusahaan yang *go public* meningkat dan mengindikasikan gairah ekonomi sector riil meningkat.

Besarnya sumbangan perusahaan BUMN terhadap pembentukan IHSG dapat kita lihat dari tingkat kapitalisasi pasar perusahaan BUMN. Jika dillihat dari bentuk BUMN maka dari jumlah BUMN tahun 2006 sebanyak 139 perusahaan, hanya 12 BUMN yang berbentuk perseroan terbuka. Dari ke 12 perusahaan BUMN tersebut dan 2 perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas, yakni Indosat dan PT Bank Bukopin, data per 28 Desember 2006 menunjukkan tingkat kapitalisasi pasar mencapai 493,26 triliun atau 40,23% dari total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia. Dari jumlah tersebut tingkat kapitalisasi pasar terbesar adalah Telkom 203,62 T (17,59%), Bank BRI 62,57 T (5,41%); Bank Mandiri 59,22 T (5,02%); dan sisanya 127,26T dari 11 BUMN lainnya. Sementara pada akhir tahun 2008 persentase kapitalisasi perusahaan BUMN terhadap kapitalisasi BEI adalah rata-rata 35% dan seperti pada tahun sebelumnya kapitalisasi terbesar adalah TELKOM, Bank Mandiri dan Bank BRI.

Hasil analisis Antara News (2008) menunjukkan bahwa pertumbuhan kapitalisasi pasar modal pada 2007 meningkatkan sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari hanya 37,42 persen menjadi 60 persen. Nilai kapitalisasi tersebut selama 2007 terdiri dari kapitalisasi pasar saham sebesar Rp1.982 triliun, obligasi korporasi Rp79,07 triliun dan obligasi negara Rp477 triliun.

Jika dilihat dari jumlah emiten terdaftar di BEI pada tahun 2008 sebanyak 383 perusahaan, jumlah kapitalisasi BUMN sebesar 35% dari 14 BUMN merupakan angka yang sangat besar. Hal ini bermakna bahwa privatisasi BUMN mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar modal ini juga menunjukkan peningkatan pertumbuhan investasi di sektor riil dan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen bisa dicapai. Hal ini juga menunjukkan adanya kepercayaan investor domestik dan asing yang semakin tumbuh. Pada tahun 2007 perbandingan investasi dari keduanya adalah 78,34 : 21,66 dari total transaksi 1.050.154.301,2 juta rupiah.

3. Privatisasi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil penelitian Sugiharto (Soewarno, 2008) menemukan bahwa meski privatisasi terbukti mampu meningkatkan kontribusi keuangan terhadap negara, kebijakan privatisasi BUMN, tidak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Hasil penelitian Sugiharto menunjukkan bahwa selama periode privatisasi BUMN dijalankan, ternyata angka pengangguran justru meningkat. Belum optimalnya dampak privatisasi terhadap kesejahteraan rakyat itu, disebabkan oleh dorongan dan motivasi privatisasi BUMN. Privatisasi dilakukan untuk lebih mengedepankan kebutuhan memenuhi difisit APBN, ketimbang untuk kepentingan korporasi. Beberapa kajian mengkritisi penyebab kurang optimalnya dampak privatisasi terhadap kesejahteraan rakyat adalah intervensi politik, baik dari asing terutama IMF, lembaga politik dan birokrasi. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa privatisasi BUMN

memang cenderung mendorong terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan berdampak pada meningkatnya angka pengganggguran.

Walaupun pengangguran di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh privatisasi BUMN, namun sejak krisis ekonomi 1998 sampai dengan 2005, jumlah penganggur mengalami kenaikan secara nominal dan persentase terhadap angkatan kerja. Namun sejak tahun 2006, akselerasi laju pertumbuhan ekonomi telah berhasil menciptakan *net employment* yang positif, sehingga menghasilkan tingkat pengangguran yang menurun baik secara absolut maupun secara persentase terhadap angkatan kerja. Ekspansi lapangan kerja ini didukung oleh penciptaan lapangan kerja di sektor formal. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2008)

Metode privatisasi melalui *Initial Public Offering (IPO)* terbukti memberikan hasil yang lebih baik bagi peningkatan kinerja BUMN jika dibandingkan dengan metode privatisasi non-IPO, seperti Strategic Sales. Metode privatisasi hendaknya mempertimbangkan berbagai faktor dan kepentingan yang berbeda, seperti pemerintah, besaran kepemilikan pemerintah, kebutuhan BUMN dan konstelasi politik. Kebijakan yang tepat dalam metode privatisasi sangat diperlukan karena terkait langsung dengan dampak yang diharapkan.

Cina adalah salah satu negara yang cukup berhasil dalam mengantarkan BUMN-nya tidak hanya sebagai perusahaan yang sehat dan berkinerja baik, tetapi juga menjadi perusahaan kelas dunia. Padahal, problem yang dihadapi BUMN Cina juga sama dengan di Indonesia. Tetapi, prestasi BUMN kita jauh tertinggal dibanding BUMN Cina. Satu hal yang patut dicatat, kebijakan privatisasi BUMN di Cina tidak menimbulkan gejolak sosial sebesar di Indonesia. Cina menganut doktrin *grasp the large and let go of the small (zhua da fang xiao)* dalam pengembangan BUMN. Artinya, pemerintah Cina akan mempertahankan BUMN besar dan melepas BUMN kecil. China memiliki banyak BUMN. Namun, hanya sebagian kecil BUMN yang merupakan perusahaan besar. Selebihnya, perusahaan kecil yang berupa *township-village enterprises* (TVEs) yang beroperasi di daerah.

Pemerintah Cina juga berhasil membuat privatisasi BUMN tidak identik dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Privatisasi BUMN di Cina dilakukan dengan minimal PHK. Ini tidak berarti bahwa kebijakan privatisasi BUMN di Cina tidak menimbulkan PHK. Namun, dibandingkan tren privatisasi BUMN di negara lain, khususnya Rusia dan Eropa Timur, tingkat PHK dan pengangguran yang ditimbulkan di Cina jauh lebih rendah. Strategi privatisasi BUMN di Cina yang ditempuh untuk mengurangi PHK adalah melalui penjatahan saham (*shareholding)* kepada pekerja dan manajemen yang dalam bahasa finansial sering disebut *employee stock option plans* (ESOP) dan *management stock option plans* (MSOP). Melalui strategi ini, pekerja BUMN memiliki peluang untuk mencegah kebangkrutan perusahaan. Karena pekerja menjadi pemilik, hal itu bisa meningkatkan motivasi mereka untuk menghidupkan perusahaan dan meningkatkan laba. Laba tersebut digunakan untuk membayar kembali utang perusahaan, sehingga tidak perlu ada PHK untuk mengurangi beban operasional perusahaan.

SIMPULAN

1. BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi berperan penting bagi keberhasilan perekonomian nasional guna mendukung keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan oleh karenanya usaha privatisasi BUMN seharusnya mengarah pada peran yang dimaksud. Guna meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya, terhadap BUMN perlu menerapkan *good corporate governance* dan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan privatisasi.
2. Keberhasilan usaha privatisasi dapat dilihat dari sisi ekonomi mikro, makro, dan ekonomi politik. Dari sisi ekonomi makro, tujuan privatisasi adalah untuk menambah sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah, perbaikan iklim investasi, dan pengembangan pasar modal.
3. Kebijakan privatisasi BUMN yang dilakukan oleh pemerintah lebih pada tujuan jangka pendek yakni menutup defisit anggaran dan hal ini adalah *misleading* apabila dipaksakan untuk dijual murah di saat krisis. Selaku pemegang saham, pemerintah mestinya berkepentingan mendorong pengembangan usaha BUMN agar bisa memperoleh laba BUMN yang cukup besar serta kontribusi pajak yang dihasilkan bagi APBN.
4. Keberhasilan privatisasi BUMN dapat dilihat dari perannya terhadap perkembangan investasi dan perkembangan pasar modal. Sementara, perkembangan pasar modal ditunjukkan oleh semakin membaiknya IHSG. Peningkatan nilai IHSG menunjukkan ekonomi sector riil di tanah air mengalami pertumbuhan dan ini bermakna meningkatkan PDB, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
5. Besarnya peran BUMN terbuka terhadap perkembangan pasar modal juga bisa dilihat dari tingkat kapitalisasi pasar BUMN terhadap kapitalisasi BEI, dimana BUMN menyumbang sebesar 35%. Hal ini bermakna bahwa privatisasi BUMN mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang ditunjukkan oleh semakin tumbuhnya kepercayaan investor domestik dan asing.

DAFTAR PUSTAKA

ANTARA, 16 Desember 2008.

Guntoro Soewarno . 2008. http://www.mediaindonesia.com /index.php?ar_id=

Ika, Syahrir Dan Agunan P. Samosir. 2002. *Analisis Privatisasi BUMN Dalam Rangka Pembiayaan APBN.* Kajian Ekonomi dan Keaungan, Vol. 6, No. 4 Desember 2002

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. 2007. *Privatisasi BUMN melalui Pasar Modal* (Presentasi Menteri Negara BUMN dalam *Indonesia Investor Forum 2* dan *Ca b pital Market Expo 2007 tanggal* 29 Mei 2007). Jakarta: Media Indonesia Online

Ruru, Balesius. 2002. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Di Lingkungan BUMN.* Makalah. PT Pusri –

Palembang, Tanggal 21 November 2002

Sofyan A. Djalil. 2008. *Peranan BUMN untuk Menggerakkan Sektor Riil dalam Situasi Krisis Global*. Makalah Rabu 26 Nopember 2008 di Hotel Ritz Carlton Jakarta.

Sunarsip. 2007. *Mencari Format Privatisasi BUMN Yang Tepat Bagi Indonesia*, .Makalah On Line.

Yasin, Mahmuddin. 2002. Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional "Strategi Reformasi BUMN" Bisnis Indonesia & FE-UGM, Boulevard Park Plaza Hotel, Jakarta, 27-28 Maret 2002

-------, 2008. Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indonesia.

http://www.Indonesia Stock Exchange.com

--------, 2008. Statistik Pasar Modal Desember 2008.
http://www.bapepamlk.depkeu.go.id